

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Terwujudnya keinginan masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita negara adalah hal terpenting di dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik. Otonomi daerah ialah sebuah kebebasan pemerintah daerah didalam mengambil keputusan dalam mengolah, mengatur, mengawasi, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada disuatu daerah tertentu.

Anggaran BM ada karena adanya kepentingan daerah, contohnya kelancaran terlaksananya tugas pemerintahan juga untuk fasilitas publik. Belanja modal merupakan bagian dari salah satu anggaran pemerintah daerah dan tergolong dalam jenis belanja langsung dimana anggarannya langsung terkait dengan pelaksanaan rencana maupun kegiatan pemerintah lainnya. karena BM berkaitan dengan kegiatan pemerintah yang dapat menambah *asset* daerah tetapi juga mengurangi kas daerah, maka sangatlah penting bagi pemerintah daerah dalam memperhatikan tingkat atau *system* akuntansi belanja modal dalam suatu daerah tertentu.

Pemerintah daerah di Sumatera Utara masih harus memprioritaskan belanja modal dari pada belanja lainnya di dalam anggaran belanja daerahnya. PDRB sebagian tergolong sebagai sumber dalam melihat kondisi juga keadaan ekonomi sebuah daerah selama satu periode akuntansi. Baik itu dasar harga konstan ataupun dasar harga berlaku.

Salah satu pendapatan biaya yang terpenting untuk Pemerintah ialah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Besar kecilnya PAD bisa meningkatkan maupun mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat pemerintah. Penerimaan PAD ialah bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah selalu berusaha dalam memberikan perhatian yang besar kepada penerapan desentralisasi *fiscal* dengan cara instrumen transfer kedaerah. Sebagai salah satunya adalah dana perimbangan. DB sumbernya dari dana transfer APBN yang diberikan untuk daerah guna membiayai kebutuhan suatu daerah dalam hal penerapan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004 tentang dana berimbang antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat).

Anggaran pembiayaan daerah berasal oleh SiLPA, dana cadangan daerah, pinjaman daerah, dan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. SiLPA yang digunakan untuk tahun

anggaran selanjutnya dapat membiayai perencanaan berikutnya oleh kewajiban belanja langsung, diantaranya belanja jasa dan barang, belanja pegawai dan juga belanja modal. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dipakai jika suatu daerah mendapati defisit APBD untuk menaikkan kapasitas layanan serta kenyamanan rakyat semasa periode berlanjut.

PDRB, PAD, dana berimbang, dan SiLPA mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Namun ada beberapa daerah yang pada tahun tertentu mengalami penurunan anggaran. Sebagai salah satu contohnya Hubungan antara variabel PDRB kepada belanja modal tidak sejalan, masalah ini dapat dilihat dari laporan keuangan *bpssumut.go.id*. Hal ini ditunjukkan pada variabel PDRB tahun 2013-2017 pada kabupaten Tapanuli Selatan yang mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Namun tidak diikuti dengan belanja modal pada tahun 2013-2017 dimana dalam tahun tertentu mengalami penurunan. Dalam hal ini peneliti mengindikasikan hubungan antara PDRB terjadi masalah dengan BM.

Hal serupa juga terjadi kepada PAD, dana berimbang, dan SiLPA yang kadang mengalami kenaikan dan penurunan dalam tahun tertentu namun tidak diikuti oleh belanja modal yang mana hal tersebut dapat diindikasikan bahwa adanya masalah antara PAD, dana berimbang, dan SiLPA terjadi masalah kepada BM.

Berdasarkan kajian masalah diatas membuat peneliti tertarik untuk menganalisis dan meneliti serta menuangkan ke dalam bentuk tulisan yang diberi judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, PAD, Dana Berimbang, dan SiLPA Terhadap BM Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017”**.

I.2 TINJAUAN PUSTAKA

I.2.1 Teori PDRB Terhadap BM

Menurut BPS (2016:3) PDRB adalah nilai tambah *brutto* semua jasa dan barang yang dihasilkan diwilayah sebuah Negara dan timbul karena adanya kegiatan ekonomi dalam suatu periode.

PDRB ialah hasil nilai tambah dan didapatkan oleh semua aktivitas produksi untuk perekonomian suatu daerah, (Adisasmita, 2014:26).

Menurut Hartati (2014) dalam jurnal, PDRB yang nilainya besar selalu memiliki belanja modal yang besar.

I.2.2 Teori PAD Terhadap BM

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana berimbang keuangan antar pemerintah daerah terhadap pusat mengatakan ialah PAD merupakan pendapatan yang didapatkan daerah dan dikutip berdasarkan UU.

PAD ialah dana yang dihasilkan daerah yang dipungut atas dasar aturan daerah yang didasarkan oleh UU Pasal I angka 18, (Halim, 2014:169).

Dalam jurnal Rizal dkk (2019), apabila PAD naik maka belanja modal juga akan mengalami kenaikan.

I.2.3 Teori Pengaruh Dana Berimbang Terhadap Belanja Modal

Menurut Siregar (2017:82) dana berimbang ialah dana yang dialokasikan didalam APBN buat daerah dalam hal membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam tujuan melakukan desentralisasi.

Dalam BPS (2017:5) dana berimbang merupakan suatu dana yang berasal oleh penghasilan APBN dan diberi untuk daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Nufus Dkk (2017) dalam jurnal, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan sumberdaya baik kepentingan nasional maupun kepentingan rakyat.

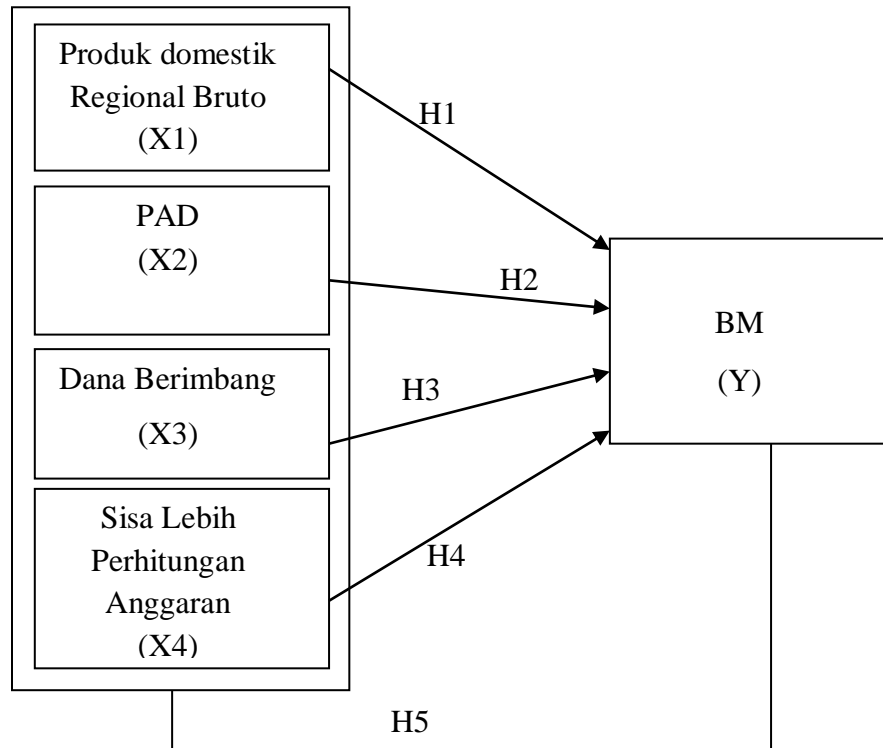
I.2.4 Teori SiLPA Terhadap BM

SiLPA ialah pendapatan daerah yang berasal dari sisa *Asset* di tahun anggaran sebelumnya (Halim 2013).

Menurut Sujarweni (2015:70) SiLPA ialah perbandingan antara pengeluaran dengan sisa lebh realisasi pendapatan selama satu tahun.

Menurut BPS (2017:12) SiLPA merupakan pos yang dibuat guna mengetahui biaya bersih, dimana berupa perbandingan atas pengeluaran pembiayaan antar pengeluaran dengan pengeluaran pembiayaan.

I.2.5 Kerangka Konseptual



Gambar I.1
Kerangka Konseptual

I.2.6 Hipotesis Penelitian

- H1 : Produk domestik regional bruto berpengaruh secara parsial kepada BM pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2017.
- H2 : PAD berpengaruh memiliki pengaruh secara parsial kepada BM pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2017.
- H3 : Dana berimbang memiliki pengaruh secara parsial kepada BM pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2017.
- H4 : SiLPA memiliki pengaruh secara parsial kepada BM pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2017.
- H5 : Produk domestik regional bruto, PAD, DB, dan SiLPA memiliki pengaruh secara simultan kepada belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2017.